



CSR Saja tidak Cukup

“Sirene Peringatan” Laporan RRI kepada Raksasa Kertas Dunia: Lindungi Hak Masyarakat Setempat di Daerah Hepu, Cina

Penelitian yang berpengaruh dan jelas sasaran oleh Rights and Resources Initiative (RRI) menantang dan akhirnya mengubah praktik-praktik tercela dari salah satu perusahaan kertas terbesar di dunia. Kajian yang dikenal luas oleh khalayak ini menyoroti meningkatnya risiko penyalahgunaan hak atas lahan di seluruh dunia yang dipacu oleh kebutuhan akan lahan hutan dan sumberdaya yang terus meningkat dan ditambah dengan tersedianya pendanaan baru berdasarkan perjanjian perubahan iklim internasional.

- + *Penelitian RRI menjadi “sirene peringatan”, yang mengingatkan perusahaan-perusahaan bahwa mereka dan investor mereka perlu secara proaktif menyelidiki klaim-klaim hak atas lahan setempat dan sengketa tanah yang masih terus berlangsung, daripada sekadar mengatakan bahwa hak dan kepentingan setempat dilindungi.*
- + *RRI menemukan bahwa “perampasan tanah” secara tidak adil memang merupakan kecenderungan dunia, sebagaimana didokumentasikan dalam Laporan Bank Dunia 2010. Namun demikian, jalan keluar yang dianjurkan oleh Bank Dunia – yang mengandalkan tanggung jawab sosial perusahaan untuk menjamin perilaku yang baik– jelas terbukti tidak cukup.*
- + *CEO perusahaan kertas dunia, Stora Enso, mengakui di hadapan umum bahwa “kesadaran yang lebih baik mengenai permasalahan” merupakan hasil dari laporan RRI dan berjanji untuk meralat kontrak-kontrak yang ada guna memastikan bahwa “kontrak didasarkan pada pilihan sukarela penduduk desa yang akan menerima penggantian yang adil (atas lahan mereka).”*

Pada Oktober 2010, sebuah kajian baru yang dilakukan oleh RRI dan Landesa-RDI menemukan bahwa Stora Enso, salah satu dari pabrikan kertas terbesar dunia, bersama-sama dengan para pejabat setempat dan makelar, menggunakan cara-cara kotor untuk menguasai ribuan hektar kawasan hutan Cina, dengan sasaran memperoleh 120 ribu hektar perkebunan Eucalyptus di Wilayah Otonomi Guangxi Zhuang, Cina bagian selatan.

Walaupun komitmen Stora Enso untuk menerapkan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) diakui bagus, para makelar bayaran yang bertindak atas nama pabrikan bubur kertas Finlandia tersebut sering melanggar hukum dalam upaya mereka untuk memperoleh lahan; terkadang mereka

mengancam secara fisik petani yang menolak menandatangani pelepasan hak mereka. Dalam proses tersebut, para makelar ini menggerogoti langkah-langkah yang telah diambil pemerintah pusat Cina belakangan ini untuk memungkinkan kelompok-kelompok kolektif masyarakat menyerahkan penguasaan atas lahan kepada masing-masing rumah tangga petani secara langsung, yang berpengaruh pada 100 juta hektar lahan dan memberi manfaat kepada lebih kurang 400 juta orang.

Menurut Li Ping, salah satu anggota tim penulis laporan yang berjudul *Studi Kasus mengenai Pembebasan Kawasan Hutan Luas di Cina: Proyek Perkebunan Stora Enso di Kabupaten Hepu, Provinsi Guangxi*, “ini keterlaluan karena langkah penting dan bersejarah ini, yang dirancang untuk menjamin hak petani atas lahan hutan mereka, telah dilecehkan sedemikian rupa.”

Laporan RRI dan Landesa-RDI juga mencatat bahwa Cina tidak sendiri menghadapi perampasan tanah secara tidak patut – bahkan, penyalahgunaan dan eksploitasi hak atas tanah telah melonjak secara eksponensial di seluruh dunia karena kebutuhan akan lahan pertanian dan hutan meningkat dan tersedianya pendanaan baru berdasarkan perjanjian perubahan iklim dunia yang bertujuan untuk melindungi hutan.

Temuan mengenai kecenderungan dunia ini didukung oleh laporan Bank Dunia pada akhir 2010 tentang “perampasan tanah”. Akan tetapi, kasus Stora Enso di Guangxi membuktikan bahwa cara mengatasi sebagaimana dianjurkan oleh Bank Dunia – dengan mengandalkan tanggung jawab sosial perusahaan untuk menjamin perilaku yang baik – nyata sekali tidak cukup.

Hal yang dijelaskan oleh kasus ini adalah bahwa masyarakat setempat tidak dapat mengandalkan tanggung jawab sosial perusahaan ataupun undang-undang untuk melindungi hak mereka.

Mekanisme independen untuk pertanggungjawaban, kehati-hatian, dan ganti-rugi juga dibutuhkan.

Marcus Colchester
Direktur, Forest Peoples Programme

Lembaga-lembaga penulis menggunakan laporan tersebut untuk memaparkan risiko melekat dalam sikap mengandalkan CSR semata-mata seraya berharap mengubah watak investasi yang terus melaju meningkat menjadi perusahaan-perusahaan yang ramah kepada masyarakat setempat dengan menolong mengangkat masyarakat perdesaan keluar dari kemiskinan. Di Guangxi, di tempat pemerintah pusat melakukan upaya keras untuk memperkuat hak petani miskin di perdesaan, RRI dan Landesa-RDI berhasil menyoroti perlunya pemerintah daerah dan investor memastikan bahwa lahan yang mereka peroleh telah diserahkan secara sukarela dan sah.

Walaupun Stora Enso telah menerima beberapa penghargaan untuk praktik berusaha secara etis, cara mereka dalam hal ini sangatlah mengecewakan. Staf RRI dan Landesa-RDI memberi tahu pimpinan Stora Enso mengenai ketidakberesan hukum dalam pembebasan lahan mereka jauh sebelumnya sejak awal 2006 dan berulang enam bulan kemudian selama kajian lapangan perkebunan di Kabupaten Hepu. Laporan ini, yang akhirnya menyebabkan Stora Enso mengubah praktiknya yang membahayakan tersebut, diterbitkan pada tahun 2009 ketika protes petani melawan pembebasan lahan oleh perusahaan tersebut di Hepu berakhir dengan kekerasan.

RRI dan Landesa-RDI membagikan laporan akhirnya kepada para pejabat Stora Enso sebelum menerbitkannya dan mendesak dilakukannya tindakan perbaikan segera oleh perusahaan tersebut untuk mengatasi ketidakberesan ini. Sejak diterbitkannya temuan tersebut untuk umum pada Oktober

2010, Stora Enso telah mulai melakukan tindakan dan telah berhubungan dengan lembaga-lembaga penulis untuk meminta saran tentang cara memperbaiki kebijakan mereka yang gagal. Pada bulan Maret 2011, para perwakilan Stora Enso dan pejabat *International Finance Corporation* (IFC) bertemu dengan Landesa-RDI, yang menganggap laporan tersebut sebagai “sirene peringatan” bagi perusahaan tersebut dan menyoroti perbaikan penting yang telah dilakukan oleh Stora Enso sejak Oktober sebagai berikut:

Pada “Pesan dari CEO” dalam Laporan Keberlanjutan Stora Enso 2010, CEO mengakui bahwa “kesadaran yang lebih baik mengenai permasalahan” merupakan hasil dari laporan RRI dan berjanji untuk “meralat kontrak dan memastikan bahwa kontrak-kontrak tersebut dibuat berdasarkan pilihan sukarela penduduk desa penerima penggantian yang adil.”

- Secara resmi, menerima temuan dalam laporan RRI/Landesa-RDI dan menegaskan kembali komitmen mereka untuk melakukan perbaikan lebih lanjut dengan “menyempurnakan tata cara pemantauan untuk memastikan dipenuhinya persyaratan dalam praktik, yang khususnya akan mencakup penilaian independen secara keberlanjutan dan pelaksanaan audit secara keberlanjutan pula.”
- Mencari berbagai kemungkinan untuk melakukan perubahan-perubahan yang bersifat tetap dalam

proses pembebasan lahannya, dengan menjanjikan dalam Laporan Keberlanjutan tahunan mereka bahwa “kami telah melakukan tindakan-tindakan tertentu untuk memperbaiki proses sewa lahan dan untuk menjamin dihormatinya hak guna lahan. Pada tahun 2010, kami menyelesaikan peninjauan (yang mencakup hampir 2.300 buah kontrak) dan tindakan untuk menyesuaikan kontrak-kontrak tersebut guna memuaskan semua pihak sedang kami lakukan.”

Laporan tersebut berlaku sebagai “sirene peringatan” bukan hanya bagi Stora Enso, melainkan juga bagi perusahaan-perusahaan lain – bahkan perusahaan – bahwa mereka dan investor mereka perlu berprakarsa menyelidiki hak atas tanah dan sengketa tanah yang masih terus berlangsung. Mereka tidak boleh berasumsi atau berandai-andai bahwa hak dan kepentingan setempat telah dilindungi, atau bahwa hukum yang berlaku dipatuhi, bahkan bilamana pemerintah setempat menjanjikan adanya kepatuhan terhadap kebijakan yang ada.

Studi Kasus mengenai Pembebasan Kawasan Hutan Berskala besar di Cina merupakan contoh kemampuan Rights and Resources Initiative untuk menggabungkan penelitian yang mantap dan tepat waktu dengan keterlibatan yang terbuka dan bertanggung jawab untuk mempertahankan dan mengamankan hak penduduk setempat atas lahan. Dalam hal ini, RRI dan Landesa-RDI menemukan bahwa semata-mata patuh pada pedoman tanggung jawab sosial perusahaan tidak cukup menjamin dihormatinya hak penduduk setempat. Setelah diterbitkannya laporan Oktober 2010, Stora Enso siap untuk menyepakati.